

## MENEGOSIASIKAN PENDIDIKAN PADA MASYARAKAT PEDALAMAN<sup>1</sup>

**Helmuth Y. Bunu**  
**Guru Besar pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**  
**Universitas Palangkaraya**  
**Jl. H. Timang, Palangkaraya, Kalimantan Tengah**  
**E-mail: [hyb047@yahoo.co.id](mailto:hyb047@yahoo.co.id)**

**Abstract:** Education problems in remote areas in the border province at Central Kalimantan have long been identified but minor policy has been induced to solve. This paper analyzes practices to overcome problems all stakeholders may participate though a concept of negotiation of education empowerment. Basically, education problems in Central Kalimantan include: isolated and remote area, low perception on education impact for children, low societal participation on education, paucity of education nuance in public areas, low social-economy of hinterland people, short number of teachers assigned in hinterland areas, ineffective management of teachers distribution and control. At the secondary and senior level, availability of SMP and SMA schools nearby has been crucial to solve. Negotiation among stakeholders to overcome the basic education problems are required to facilitate facilities, empowerment, participations, and involvements of community, parents, children and traditional head, and government.

**Keywords:** hinterland, remote area, negotiation, participation.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi terutama dalam menghadapi perubahan dan perkembangan di bidang ilmu maupun teknologi yang begitu pesat. Kebutuhan ini tidak terlepas dari semakin kompetitifnya pasar tenaga kerja yang ditandai dengan dibukanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun 2015 yang memungkinkan terjadinya persaingan tenaga kerja secara terbuka di tingkat Asean. Hal ini tentu mengharuskan seluruh SDM Indonesia mempunyai bekal pendidikan dan keterampilan yang memadai (Busro, 2015:1). Selain itu, upaya untuk mengantisipasi adalah melalui pembangunan di bidang pendidikan, antara lain dengan meningkatkan mutu pendidikan mulai pendidikan dasar, hingga pendidikan tinggi termasuk di dalamnya sekolah parsacarjana.

Sejak tahun 2007, sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pemerintah telah mengalokasikan 20 persen dari APBN untuk pendidikan, termasuk pemerintah daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota harus mengalokasikan 20% dari PABD untuk pendidikan. Peningkatan anggaran itu lebih diarahkan pada pemerataan pelayanan dan peningkatan mutu pendidikan

---

<sup>1</sup> Hasil kajian ini pernah dibacakan dalam pidato pengukuhan guru besar tetap Pendidikan IPS FKP Universitas Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

dasar, yang juga bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, tercakup pula di dalamnya pengentasan kemiskinan. Hal ini karena “pendidikan dipercaya sebagai instrumen untuk memperluas akses dan mobilitas sosial dalam masyarakat baik vertikal maupun horisontal” (Basrowi, 2010).

Masalah pendidikan merupakan bagian dari berbagai masalah bangsa yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak. Pendidikan sangat menentukan martabat manusia dan bangsa (Munir, dkk. 2007). Pendidikan merupakan pembudayaan, suatu proses yang dilalui seseorang untuk mampu hidup dalam suatu budaya/kultur tertentu (Basrowi, 2010). Dengan konsekuensi ini, praktik pendidikan selalu disesuaikan dengan kultur yang berkembang baik di sekolah maupun di masyarakat. Banyak nilai-nilai kultur dan orientasinya bisa mendorong keberhasilan pendidikan. Namun, hal itu juga dapat menjadi penghambat bagi keberhasilan pendidikan, seperti kultur malas, kebiasaan terlambat, tidak menghargai pendapat orang lain, ingin menang sendiri, dan lain-lain. Kultur seperti itulah yang akan dihilangkan melalui proses pendidikan yang baik.

Proses pendidikan yang baik akan mampu memberi manfaat yang besar bagi masyarakat, termasuk dalam hal ini masyarakat pedalaman Kalimantan Tengah. Sayangnya, adanya faktor penghambat seperti: 1) geografi yang sulit dijangkau, terpencil, terisolir, 2) rendahnya pemahaman masyarakat akan makna penting pendidikan bagi anak, 3) rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pendidikan, 4) masih terbatasnya nuansa-nuansa pendidikan dalam ruang publik di daerah pedalaman, 5) rendahnya tingkat sosial ekonomi masyarakat pedalaman, 6) keterbatasan sumber daya manusia atau guru yang bersedia ditempatkan di daerah pedalaman, 7) lemahnya manajemen pemerataan guru, 8) lemahnya pengawasan terhadap disiplin guru di daerah pedalaman, 9) jauhnya lokasi sekolah menengah atas (SMA/SMK) dari lokasi tempat tinggal masyarakat pedalaman, dan 10) sarana dan prasarana pendidikan yang masih sangat terbatas.

## **KONSEP NEGOSIASI DALAM RANAH PENDIDIKAN**

Menurut Robbins dan Judge (dalam Akhmad Kasinu, 20114), negosiasi merupakan sebuah proses di mana dua belah pihak atau lebih melakukan tawar-menawar tentang sesuatu untuk mendapatkan kesepakatan. Menurut Ivancevich *et.al.*, (2012) negosiasi merupakan sebuah proses yang melibatkan dua pihak atau lebih yang berbeda pendapat berusaha mencapai kesepakatan. Dengan kata lain, negosiasi adalah proses pembuatan keputusan memberi dan menerima yang melibatkan pihak-pihak yang saling terkait dengan preferensi berbeda.

Sementara itu, Hadari Nawawi (2012) menjelaskan negosiasi merupakan: 1) perilaku atau proses penetapan keputusan mengenai sesuatu kepentingan yang sama antardua belah pihak yang memiliki referensi yang berbeda, 2) sebagai suatu cara untuk menetapkan keputusan yang dapat disepakati dan diterima oleh dua pihak dan menyetujui apa dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan di masa mendatang, 3) suatu bentuk pertemuan antara dua pihak yang bertujuan untuk menghasilkan suatu persetujuan bersama, 4) proses antara dua belah pihak untuk mencapai persetujuan yang dapat memenuhi kepuasan semua pihak yang berkepentingan dengan elemen-elemen kerjasama dan kompetisi, 5) proses tawar menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima, guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak yang lain, 6) sebagai salah satu cara penyelesaian

sengketa secara damai melalui perundingan antarpihak-pihak yang bersengketa.

Apabila dikaitkan dengan negosiasi pendidikan dalam masyarakat pedalaman, maka negosiasi dapat dimaknai sebagai proses menetapkan keputusan yang dapat disepakati dan diterima oleh masyarakat, guru, kepala sekolah, kepala desa, camat dan semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan di daerah pedalaman hingga menghasilkan suatu persetujuan bersama dan dapat memenuhi kepuasan semua pihak yang berkepentingan.

Menurut Robert Kritner dan Angelo Kinicki negosiasi dibedakan menjadi dua, yaitu negosiasi *distributive* dan *integrative*. Negosiasi *distributive* biasanya melibatkan satu masalah tunggal, sementara itu, negosiasi *integrative* masalah yang dipertaruhkan lebih dari satu (Akhmad Kasinu, 2014)

Menurut Hadari Nawawi (2012), ada dua jenis negosiasi. *Pertama*, negosiasi kompetitif adalah perundingan dengan suasana yang tidak ramah dan masing-masing pihak berusaha mendapatkan tawaran terbaik bagi diri atau pihaknya. *Kedua*, negosiasi kooperatif merupakan negosiasi yang dilakukan untuk meminimalkan konflik dengan mencari solusi untuk semua pihak agar mendapat manfaat. Melihat tipologi negosiasi di atas, kedua jenis negosiasi tersebut terjadi pada masyarakat pedalaman. Artinya, negosiasi antara masyarakat pedalaman dan pemangku kepentingan pendidikan di daerah pedalaman untuk hal-hal tertentu bisa bersifat kooperatif, bisa juga kompetitif.

Lebih lanjut Hadari Nawawi menjelaskan bahwa negosiasi yang dilakukan antara dua pihak bertujuan: a) agresif yakni tujuan untuk memenangkan perundingan, b) kompetitif yakni tujuan untuk memperoleh sesuatu yang lebih (*getting more*) dari pihak lawan, c) kooperatif yakni tujuan memperoleh kesepakatan yang saling menguntungkan (*mutual gain*), d) pemusatan diri yakni untuk memperoleh keuntungan tanpa memperhatikan penerimaan pihak lawan, e) defensif yakni tujuan untuk memperoleh hasil yang terhindar dari sesuatu yang bersifat negatif, dan f) kombinasi antara dua atau lebih tujuan tersebut di atas.

Negosiasi yang dilakukan antara masyarakat pedalaman dan pemangku kepentingan pendidikan ada yang bertujuan memenangkan pengaruh (khususnya dari pihak pemangku kepentingan pendidikan), bertujuan memperoleh kesepakatan yang saling menguntungkan, memperoleh hasil yang terhindar dari sesuatu yang bersifat negatif (khususnya dari pihak masyarakat pedalaman dan pemangku kepentingan pendidikan).

### **KONSEP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KONTEKS WAJIB BELAJAR**

Partisipasi dalam dapat dimaknai sebagai keikutsertaan atau peran serta atau keterlibatan seseorang dalam suatu kegiatan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa Indonesia, 1990). Sedangkan menurut Tannenbaun dan Hahn (dalam Soenyono, 2010), partisipasi sebagai suatu tingkat sejauh mana peran anggota melibatkan diri di dalam kegiatan dan menyumbangkan tenaga dan pikirannya dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Lebih lanjut dijelaskan, terdapat dua jenis partisipasi, yaitu (a) partisipasi secara bersama-sama untuk suatu tujuan tertentu yang merupakan kepentingan bersama, (b) partisipasi secara perorangan untuk suatu tujuan tertentu di luar kepentingan bersama.

Partisipasi, menurut Dusseldorp (1981:33) diartikan kegiatan atau keadaan mengambil bagian dalam suatu aktivitas untuk mencapai suatu kemanfaatan secara optimal. Robert E. Lauer (dalam Sumarno, 1996) mengatakan bahwa: "*Participation is function of individual*

*need for social adjustment with or there in this community all though such adjustment has a variety ideo syneratie meaning and function each person*". Sedangkan ahli lain yaitu Keith Davis berpendapat bahwa "*Participation is defined as mental and emotional involvement of a person in group situation whith contribute to group goal and shaare responsibility in them*" (1967:128). Sedangkan menurut Cohen dan Uphoff (1979:7), partisipasi adalah keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan program, memperoleh kemanfaatan, dan mengevaluasi pogram. Menyadari pengertian partisipasi sebagaimana tertulis di atas maka partisipasi sungguh merupakan persyaratan utama bagi keberhasilan pembangunan.

Mengukur tinggi rendahnya paratisipasi masyarakat pedalaman dalam program wajib belajar dapat dilakukan dengan cara mengukur: 1) keikutsertaan masyarakat dalam program menyekolahkan anaknya mulai TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK, 2) partisipasi dalam bentuk saat membangun sekolah mulai penyediaan tanah untuk pendirian sekolah, bergotong-royong dalam bentuk tenaga pikiran, dan dana, gotong royong pendirian tenda besar untuk acara perpisahan sekolah, 3) berpartisipasi dalam merawat keberadaan sekolah, mulai dari memabat rumput sekitar dan halaman sekolah, mengecat pagar dan dinding, menutup lubang-lubang dinding sekolah, bergotong royong memperbaiki kerusakan kecil dan besar, merawat selokan di sekitar sekolah, merawat selang/pipa saluran air bersih ke kamar kecil sekolah untuk keperluan guru dan siswa, 4) mendatangi undangan sekolah baik saat pembagian raport, rapat sekolah, atau saat perpisahan kelulusan siswa, 5) berpartisipasi dalam wadah perkumpulan orang tua siswa atau komite sekolah sehingga dapat berpartisipasi dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan tindak lanjut kebijakan sekolah, 6) berpartisipasi dalam menikmati sarana dan prasarana sekolah yang dibuka untuk umum seperti lapangan sekolah, dan sarana lainnya.

Dari beberapa pengertian di atas, maka batasan mengenai partisipasi masyarakat dalam program wajib belajar sangatlah luas dalam arti seluruh keikutsertaan seseorang dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan memanfaatkan hasil pendidikan yang diselenggarakan pada masyarakat. Sebagaimana diketahui, keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) anak usia 7-12 tahun beberapa waktu lalu tidak lepas dari usaha yang sungguh-sungguh dan terus menerus dalam memenuhi kebutuhan sarana, prasarana maupun tenaga kependidikan guna menunjang pencapaian tujuan program dimaksud. Prestasi demikian tentu tidak dapat dipungkiri mengingat dalam tempo yang relatif singkat, yaitu sejak dicanangkan program Wajar Dikdas 6 tahun pada tahun 1986 pemerintah telah berhasil meningkatkan angka partisipasi murni sekolah dasar (SD) yang pada tahun 1993 telah mencapai 93,49%, dan pada tahun 1994 program Wajar Dikdas selanjutnya telah ditingkatkan lagi menjadi 9 tahun atau dikenal dengan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Saat ini, dengan dicanangkannya pendidikan untuk semua, maka pendidikan didorong menjadi 12 tahun atau hingga SMA/SMK.

Dilihat dari segi kuantitas, prestasi ini diakui sebagai suatu keberhasilan, tetapi keberhasilan tersebut masih dihadapkan pada berbagai kendala, antara lain masih tingginya angka putus sekolah SD pada masyarakat pedalaman yang secara kumulatif setiap tahun berkisar 9,7%, ditambah lagi dengan rendahnya kualitas proses maupun hasil belajar siswa SD di daerah pedalaman, dan sejumlah kendala lain yang menghadang seperti faktor geografis sekolah, tingkat sosial ekonomi masyarakat, maupun faktor-faktor lain yang perlu diantisipasi untuk penyelesaiannya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hanusek dalam Zamroni (2001) mengemukakan bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak hanya dilakukan melalui pendekatan konvensional saja, namun juga melalui pendekatan inkonvensional. Pendekatan konvensional lebih memperhatikan *input*, *process*, dan *output* sebagai hal yang mekanis. Kalau *input* dan *process* diperbaiki maka *output* akan meningkat dan sebaliknya. Sementara itu, pendekatan inkonvensional bertumpu pada pendekatan fungsi produksi (*Production Function Approach*). Pendekatan inkonvensional adalah pendekatan yang memandang pendidikan sebagai suatu proses kultural atau organis bukannya mekanis. Dalam proses kultural atau organis, pendidikan tidak sekedar proses input-output yang bersifat linier langsung, melainkan proses interaksi dari berbagai komponen pendidikan, seperti guru, siswa, kepala sekolah, tenaga kependidikan, dan orang tua siswa.

Meningkatkan kualitas pendidikan sebagaimana diuraikan di atas, seluruhnya tercakup dalam proses pembangunan pendidikan. Upaya-upaya peningkatan mutu pendidikan khususnya pada sekolah dasar merupakan tanggungjawab semua pihak yang terkait. Pada dasarnya, kesadaran masyarakat pedalaman di bidang pendidikan bukan merupakan hal yang baru, dari bentuk kesadaran menyumbang tanah untuk mendirikan sekolah, atau bentuk misi keagamaan, sampai dengan bentuk-bentuk peranserta insidental seperti sekedar perbaikan ruang belajar, penyelenggaraan kegiatan sekolah yang bersifat ko-kurikuler atau ekstra-kurikuler.

Kesadaran masyarakat pedalaman akan pendidikan anak juga dapat dilihat dari terbentuknya organisasi Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG), kemudian dimodifikasi keberadaannya menjadi Badan Pembantu Pelaksanaan Pendidikan (BP3), kemudian diganti lagi menjadi Komite Sekolah. Meskipun, kenyataannya hingga sekarang keterlibatan Komite Sekolah masih terbatas pada penyediaan dana, sarana maupun prasarana pendidikan.

Kesadaran masyarakat pedalaman sebagaimana tersebut di atas, dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka yang tercermin dalam berbagai bentuk dan ekspresinya, terutama di masyarakat pedalaman yang dikenal dengan prinsip gotong royong mendirikan sekolah. Akan tetapi dengan adanya pendekatan birokratik (era Orde Baru) yang kurang tepat dapat menjadi penghambat tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk membantu sekolah secara spontan dan optimal. Pada waktu pemerintah membangun gedung SD Impres secara masal, masyarakat memahami dan memaknainya sebagai "pembebasan dari kewajiban" untuk berpartisipasi dalam menyediakan tempat belajar yang memadai bagi anak-anak mereka. Mereka menyadari sudah "terbantu oleh pemerintah." Padahal sebelumnya sudah mengakar di kesadaran masyarakat akan arti penting pendidikan dengan mengembangkan budaya gotong royong membangun sekolah (Basrowi, 2010).

Kesadaran (Setiyadi, 2013:23) adalah aliran pengalaman-pengalaman hidup (*Erlebnisse*), yang di dalamnya memiliki esensinya sendiri (yang antara lain: persepsi, ingatan, emosi). Begitu juga kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya memiliki sifat yang aktif dan senantiasa bergerak sebagai aliran pengalaman-pengalaman hidup. Obyek-obyek yang diperjuangkan menampakkan diri sebagaimana adanya dan melekat dalam kesadaran.

Setiyadi (2013:26) menjelaskan bahwa kesadaran diandaikan sebagai substansi yang

berdiri dan bertindak sendiri serta tidak memerlukan sesuatu yang lain untuk keberadaannya. Kesadaran dianggap sebagai dialektika antara subyek dan dunianya (obyek). Subyek dan dunia adalah korelatif, artinya subyek terarah kepada dunia dan dunia "menampak" bagi subyek. Relasi subyek-obyek membuat tindakan subyek bermakna, sehingga relasi dengan dunia (obyek) menjadi esensi bagi subyek itu sendiri.

Apabila dikaitkan dengan kesadaran orang tua dalam menyekolahkan anak, maka kesadaran di sini adalah suatu transendensi orang tua atas penghayatan diri dan penghayatan pendidikan anak, serta kesadaran orang tua dalam memahami makna pendidikan bagi anak. Semakin tinggi tingkat kesadaran orang tua terhadap pendidikan semakin tinggi pula dorongan orang tua untuk menyekolahkan anak.

Kesadaran masyarakat pedalaman terhadap arti pendidikan anak sebenarnya merupakan manifestasi kesungguhan masyarakat pedalaman sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia. Akan tetapi, peranan yang demikian belum diikuti penciptaan hubungan kerjasama yang baik, atas dasar kedudukan yang sama, dan dengan penuh kesadaran akan arti penting pendidikan bagi kemajuan bangsa. Hal ini terbukti, (a) masih banyak orang tua di daerah pedalaman yang enggan untuk menghadiri rapat yang diadakan sekolah yang berkaitan dengan kemajuan pendidikan, dengan alasan sibuk, dan bahkan hanya diwakilkan anaknya yang sudah agak besar, (b) orang tua di daerah pedalaman merasa sudah selesai tugasnya bila sudah menyekolahkan anaknya, mereka kurang memperhatikan keperluan sekolah yang berkaitan dengan kebersihan seragam, kondisi sepatu, maupun buku pegangan siswa, bahkan setiap anaknya minta uang mereka berkata "sedikit-sedikit uang", (c) orang tua di daerah pedalaman juga kurang memperhatikan terhadap pekerjaan rumah (PR) anak, dan bahkan membiarkan anak-anaknya menonton televisi atau bermain di luar rumah sampai larut malam, (d) orang tua di daerah pedalaman kurang antusias untuk melanjutkan sekolah anaknya sampai ke Sekolah menengah Pertama (SLTP), dan (e) masih banyak masyarakat pedalaman yang menginginkan anaknya membantu mencari nafkah daripada harus melanjutkan sekolah, terbukti masih banyak masyarakat pedalaman yang membiarkan anaknya putus sekolah.

Rasa ketidaktahuan masyarakat pedalaman berkaitan dengan arti penting pendidikan bagi anak, juga menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat pedalaman terhadap pendidikan. Hal ini karena (a) kurang efektifnya pendekatan kemasyarakatan, keagamaan, dan sosial budaya dalam membangkitkan kesadaran masyarakat pedalaman terhadap pendidikan, (b) kurang penuhnya peran kepala sekolah, guru, dan pejabat pemerintahan desa dalam membangkitkan minat masyarakat pedalaman dalam menyekolahkan anak, dan (c) masih rendahnya peran forum komite sekolah dan masyarakat pedalaman dalam meningkatkan kesadaran, sikap, persepsi dan penilaian masyarakat pedalaman akan arti pendidikan.

Persepsi masyarakat pedalaman yang kurang memahami akan pentingnya pendidikan beranggapan bahwa pendidikan bukan merupakan jaminan hidup sejahtera. Sekolah hanya membuang waktu dan biaya; pendidikan dasar saja cukup; bagi anak yang penting sudah bisa membaca, menulis dan menghitung (Calistung). Partisipasi dan persepsi masyarakat pedalaman terhadap pendidikan juga terkait dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kondisi sosial ekonomi sebagai kaitan antara status sosial dan kebiasaan hidup sehari-hari yang telah membudaya bagi individu atau kelompok. Kebiasaan hidup yang membudaya ini biasanya disebut dengan *culture activity*.

Di dalam masyarakat pedalaman yang sederhana, pola interaksi atau pergaulan hidup antara individu menunjuk pada perbedaan kedudukan dan derajat atau status. Status sosial ekonomi mempunyai makna suatu keadaan yang menunjukan pada kemampuan finansial keluarga dan perlengkapan material yang dimiliki. Kondisi sosial ekonomi penduduk meliputi aspek sosial, aspek sosial budaya, dan aspek desa yang berkaitan dengan kelembagaan dan aspek peluang kerja. Aspek ekonomi desa dan peluang kerja berkaitan erat dengan masalah kesejahteraan masyarakat pedalaman. Kecukupan pangan dan keperluan ekonomi bagi masyarakat pedalaman baru terjangkau bila pendapatan rumah tangga mereka cukup untuk menutupi keperluan rumah tangga dan pengembangan usaha-usuhnya (Sajogyo, 2001). Dalam hubungannya dengan pola berusaha tani, perbedaan status seseorang dalam masyarakat ditentukan oleh pola penguasaan lahan, modal, teknologi, dan luasnya lahan pemilikannya.

Keluarga pada masyarakat pedalaman merupakan faktor utama dalam menentukan tingkat ketercapaian pendidikan anak-anaknya. Namun, pendidikan keluarga pada masyarakat pedalaman tidak semata-mata tergantung pada keluarga itu sendiri. Oleh karena itu, suatu keluarga tertentu hidup berdampingan dengan keluarga-keluarga lain. Pengaruh keluarga lainnya tidaklah boleh dikesampingkan. Demikian halnya dengan unsur-unsur lainnya dalam masyarakat pedalaman, yang kesemuanya disebut sebagai kondisi sosial. Saat ini, masih banyak masyarakat pedalaman yang tidak mampu menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun.

Penyebab rendahnya tingkat pendidikan anak-anak pada masyarakat pedalaman disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya adalah: 1) tingkat sosial ekonomi masyarakat yang rendah, 2) persepsi masyarakat tentang pendidikan formal yang kurang baik sebagai akibat kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya pendidikan, 3) kurangnya motivasi orang tua dalam menyekolahkan anak, 4) rendahnya keinginan anak untuk melanjutkan sekolah, 5) rendahnya keberpihakan pemerintah hasil pemekaran terhadap pendidikan, sehingga belum mampu mendekatkan sekolah kepada masyarakat dengan cara membangun sekolah di daerah pemekaran, 6) kurangnya interaksi yang intensif antara masyarakat lokal dan pemerintah.

## **MENGHADIRKAN PENDIDIKAN DALAM RUANG PUBLIK**

Hadirnya pendidikan di ruang publik masyarakat pedalaman secara umum bisa dilihat sebagai penyebaran nilai-nilai ilmu pengetahuan kepada masyarakat dengan memanfaatkan ruang publik, yaitu ruang atau arena, baik nyata maupun virtual, yang digunakan secara bersama oleh warga masyarakat untuk mengkomunikasikan dan menegosiasikan berbagai ide dan kepentingan, termasuk di dalamnya berbagai hal yang bermuatan pendidikan.

Maraknya pendidikan di ruang publik yang terjadi pada masyarakat pedalaman selama satu hingga dasawarsa terakhir ditunjukkan oleh beberapa indikasi yang cukup menonjol, seperti didirikannya sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) di desa pedalaman, munculnya kesadaran menyekolahkan anak ke tingkat SMP dan SMA di daerah pedalaman, dan banyaknya bantuan dari lembaga supra desa untuk membangun sekolah dan melengkapi sarana dan prasarana pendidikan di pedalaman. Di bidang kebudayaan, dengan hadirnya antena parabola dan *traffic base transmission system* (BTS) di pedalaman, sehingga sehingga berbagai acara di televise yang bernuansa pendidikan, berita yang bermuatan

edukasi, sinetron edukasi, iklan layanan masyarakat tentang pendidikan seperti iklan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK Bisa!), yang semuanya dapat ditonton oleh masyarakat pedalaman.

Promosi pendidikan di ruang publik juga dapat dijumpai dengan tingginya minat masyarakat menonton/mendengarkan berbagai acara yang bermuatan pendidikan, baik di TV dan radio dengan variasi acara sebagai media pembelajarannya. Melalui media ini, masyarakat banyak mendapatkan informasi makna pendidikan bagi anak, selain mendapatkan dari media tradisional yang telah lama dan masih eksis, seperti pengambilan raport oleh orang tua, rapat seluruh wali murid di sekolah, pengambilan ijazah, perpisahan kelas VI di sekolah, rapat kampung yang membahas pendidikan, dan berbagai kegiatan publik lainnya.

Acara pendidikan di TV sebenarnya juga mampu mempengaruhi perubahan persepsi masyarakat pedalaman akan peran penting pendidikan bagi anak, sehingga banyak anak dari daerah pedalaman yang ingin masuk sekolah SMA/SMK meskipun lokasinya jauh dari daerah tempat tinggalnya. Di sisi yang berbeda, banyak juga anak yang menjadi malas belajarnya khususnya anak-anak yang sudah kecanduan sinetron dan berbagai acara hiburan lainnya.

Dengan adanya HP, fenomena kehidupan masyarakat pedalaman juga mengalami perubahan. Saat sekolah, sering terdengar HP berbunyi, meskipun guru sudah berulang kali mengingatkan agar tidak membawa HP atau mematikan HP saat di kelas.

Perluasan pengaruh pendidikan di ruang publik juga berkenaan dengan soal kebiasaan menjaga kebersihan diri dan berbusana anak. Mereka menjadi terbiasa mandi pagi, memakai baju yang sudah disetrika, menggunakan baju seragam, menggunakan sepatu dan kaos kaki (meskipun belum seluruh anak), membawa tas ke sekolah, dan lain-lain, *Trend* anak perempuan saat sekolah juga banyak yang menggunakan kucir (pengikat) rambut, “bandau” rambut, asesoris gelang, dan perhiasan lainnya yang kadang-kadang berupa emas.

Pada dekade tahun 1990-an, pada ruang publik tidak ada anak-anak yang mau menggunakan sepatu saat sekolah, selain tidak punya, juga tidak terbiasa menggunakan sepatu, bahkan ada juga yang malu kalau menggunakan sepatu, karena mayoritas temannya tidak memakai. Sekarang, sebagian anak-anak dengan kesadarannya sendiri mengenakan sepatu baik pergi ke sekolah, maupun saat mengikuti perlombaan mewakili sekolah di tingkat kecamatan.

Gejala ini menimbulkan dua penafsiran: *pertama*, kostum sekolah dapat dipahami sebagai ekspresi motivasi untuk mengikuti sekolah, dan *kedua* sebagai bagian dari penampilan dan gaya hidup yang berkembang dalam konteks budaya populer anak didik terpelajar. Promosi pendidikan di ruang publik (*public sphere*) yang berlangsung selama ini, cenderung menjadikan pendidikan sebagai bagian dari ekspresi kehidupan nyata yang bernuansa akademik dan kebudayaan.

Aksentuasi simbol-simbol pendidikan seperti seragam sekolah, sepatu, tas sekolah, dan berbagai label yang ditempel di lengan baju, kerah baju bagian depan, dan saku baju seragam, termasuk kesadaran menyekolahkan anak pada masyarakat pedalaman, kini telah muncul. Pendidikan dasar tidak lagi termarginalkan, tetapi telah menjadi bagian dari ekspresi kesadaran masyarakat akan makna penting pendidikan, kegiatan edukasi, dan aktivitas pendidikan lainnya.

Fenomena kemajuan teknologi di bidang transportasi darat dengan pembukaan jalan baru meskipun kondisinya masih belum maksimal, termasuk menjamurnya motor juga telah

mempengaruhi pola kehidupan dan kesadaran masyarakat akan pendidikan bagi anak-anaknya. Di era tahun 1990-an, mayoritas masyarakat saat pergi ke kota dengan melewati jalan sungai, bahkan pada malam hari, masyarakat yang bepergian harus menginap di jalan, tetapi saat ini, realitas yang berkembang sudah tidak demikian. Tidak sedikit masyarakat yang pergi ke kota dengan menggunakan mobil atau mengendarai motor sendiri.

Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan pada masyarakat pedalaman banyak dipengaruhi oleh pembangunan infra-struktur seperti jalan raya, pembangunan jembatan penghubung, jaringan listrik, pembangunan sarana komunikasi dan informasi (TV dan HP), dan pembangunan fisik lainnya. Perubahan kehidupan bermasyarakat dan kehidupan dalam ranah pendidikan juga terjadi setelah adanya pembangunan jalan raya yang merupakan jalur darat yang kini lebih disukai daripada jalan sungai. Dahulu, banyak rumah berada di tepi sungai, kini sudah banyak yang berpindah ke tepi jalan, meskipun jalannya masih berupa tanah yang diratakan dengan bulldoser, belum diberi batu, apalagi aspal atau cor beton. Akibatnya, setiap hujan datang, jalannya sungguh sangat licin, berlendut, bahkan banyak yang terputus karena belum dibuat gorong-gorong saluran air. Konsekwensinya, hanya mobil berkekuatan ekstra yang bisa melewati jalan itu. Namun demikian, biaya transportasi melewati darat dirasakan masyarakat pedalaman lebih murah, jarak tempuh menjadi lebih dekat, waktu tempuh lebih cepat, biaya transportasi lebih murah, dan tingkat keamanan dirasakan lebih aman.

Setelah jalan jalur darat dibangun, banyak guru-guru muda dari alumni program keguruan seperti Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), sekolah tinggi ilmu pendidikan, dan berbagai alumni program keguruan lainnya yang mau ditempatkan di daerah pedalaman yang sebelumnya terkesan sebagai daerah yang belum terjamah oleh pendidikan, karena banyaknya masyarakat yang menganggap pendidikan tidak penting, tidak banyak berguna bagi peningkatan ekonomi rumah tangga, dan alasan lainnya.

Dengan pembangunan jalan ini, ada beberapa mobil pedagang, travel, dan mobil pribadi yang melintas jalur ini. Dengan adanya jalur transportasi ini, tentu membawa perubahan cara pandang, cara pikir, dan cara berperilaku masyarakat, yang sebelumnya sangat "kampungan", menjadi terbuka wawasannya, baik berkaitan dengan wawasan pendidikan, ekonomi, politik, maupun wawasan lainnya.

Dengan adanya jalan, banyak anak-anak dari kelompok masyarakat menengah ke atas yang melanjutkan ke wilayah kecamatan atau kabupaten yang jaraknya sangat jauh dari daerah asal, sehingga mereka harus menyewa kamar (kos) di sekitar sekolah tempat menuntut ilmu.

Dengan banyaknya guru yang bersedia masuk ke daerah pedalaman, masyarakat menyaksikan di ruang publik munculnya orang-orang yang siap mengabdikan di daerahnya, yang dengan senang hati tidak punya niat atau bahkan tidak mau dipindahkan ke kota, karena mereka merasa nyaman tinggal di daerah pedalaman, apalagi mereka telah menikah dengan masyarakat pedalaman.

Sayangnya, masih ada beberapa guru CPNS yang sengaja hanya dititipkan di daerah pedalaman, sebagai bukti telah ditempatkan secara merata sesuai identifikasi daerah-daerah pedalaman yang masih kekurangan guru, tetapi ketika LSM atau media lengah, para CPNS guru tersebut minta pindah dan dipindahkan ke kota. Dengan status "guru titipan" menyebabkan kepala sekolah kesulitan untuk melakukan pembinaan dan pemberian jam

mengajar yang mencukupi, karena setiap saat bisa pindah, dan pada saat perpindahan itu, mengakibatkan proses pembelajaran terganggu, dan siswa menjadi pihak yang sangat dirugikan.

Ada juga ditemui beberapa guru yang awalnya bertugas di kota kemudian dipindah ke daerah pedalaman, kemudian mereka hanya datang ke sekolah pada tanggal muda untuk mengambil gaji. Mereka bekerja hanya dalam beberapa hari, kemudian setelah itu mereka kembali lagi ke kota hingga tanggal muda berikutnya, dengan berbagai alasan, seperti keluarganya di kota, atau alasan lain yang sifatnya dibuat-buat dan sulit untuk bisa dipertanggungjawabkan.

Ada juga beberapa guru yang mempunyai hobi berburu, sehingga sangat mengganggu proses pembelajaran, karena waktu berburu mereka bukan hanya saat liburan sekolah, tetapi berlanjut hingga beberapa hari setelah sekolah masuk efektif. Akibatnya, ruangan kelas kosong tidak ada gurunya, dan dirangkap oleh guru lain dengan semangat setengah hati, karena guru pengganti tersebut mengerjakan pekerjaan yang bukan tugas dan tanggungjawabnya.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pendidikan pada masyarakat pedalaman dipengaruhi oleh: 1) proses pembangunan berbagai infrastruktur pendidikan dan penunjang pendidikan, 2) semakin gencarnya dinas pendidikan dalam menempatkan guru di daerah pedalaman, 3) semakin maraknya ruang publik dalam menyuguhkan berbagai nuansa pendidikan, dan 4) adanya campur tangan lembaga supra desa (kecamatan, kabupaten) dan pihak legislatif dalam membangun sarana dan prasarana pendidikan.

## **MENEGOSIASIKAN PENDIDIKAN PADA MASYARAKAT PEDALAMAN**

Dalam proses pembangunan masyarakat melalui media pendidikan tidak dimungkiri adanya penolakan masyarakat. Bentuk-bentuk penolakan masyarakat pedalaman terhadap keberadaan sekolah, fasilitas infrastruktur pendidikan seperti sekolah yang digunakan untuk tempat belajar yang dibiarkan tidak terurus.

Rumput meninggi di lingkungan sekolah, tetapi dibiarkan tidak dilakukan gotong royong. Air tidak ada di kamar kecil sekolah karena tidak mengalir dari sumbernya tetapi dibiarkan sehingga anak-anak kesulitan bila harus ke kamar kecil atau sekedar cuci tangan. Sekolah tidak ada aliran listriknya, sehingga tidak ada irama senam pagi bersama dan setiap upacara bendera “sepi sunyi” tanpa pengeras suara. Apabila malam kondisi sekolah sangat gelap dan “menyeramkan”. Melihat kondisi seperti ini, masyarakat pedalaman sekitar sekolah pun tidak peduli, tidak mau memberikan sedikit arus listriknya untuk keperluan minimal itu.

Kondisi yang memprihatinkan juga banyak dijumpai, sekolah di pedalaman yang tidak mempunyai perpustakaan, meskipun tersedia ruangan perpustakaan, tetapi hanya diisi dengan buku-buku yang sudah lusuh, kumal, dekil, cetakan lama, dalam posisi yang berserakan, tidak tertata rapih, tidak terurus, tidak ada proses pelayanan pinjam meminjam, dan dibiarkan merana.

Kondisi cat dinding di sekolah, juga banyak dijumpai yang penuh dengan coret anak-anak sekolah dan anak yang menggembala ternak. Bahkan banyak juga ditemui sekolah dengan dinding berlubang disana-sini, sehingga kucing bisa dengan mudah keluar masuk kantor guru dan ruang belajar, bahkan jendela “Nako” pun banyak yang rontok atau jatuh dan kacanya pecah, sehingga jendela menjadi berlubang, akibatnya lobang itu menjadi media anak

untuk membuang sampah ke luar kelas secara sembarangan, dan lubang itu juga sebagai sarana transportasi burung dan kelelawar yang selalu mengotori lantai kelas dan meja siswa saat malam hari. Melihat kondisi seperti ini pun, masyarakat diam seribu bahasa, tanpa melakukan tindakan apapun baik secara sukarela bergotong royong mengecat dinding yang sudah kotor, menutup berbagai lubang dinding dan jendela, dan memperbaiki kerusakan kecil lainnya.

Selama ini masyarakat mempunyai anggapan bahwa bangunan sekolah sepenuhnya milik pemerintah, masyarakat sama sekali tidak merasa memiliki, sehingga mereka tidak mau ikut serta menjaga, merawat atau memperbaiki baik kondisi lingkungan sekolah maupun bangunan sekolah.

Tetapi, kini pemandangan tersebut telah sedikit berubah. Ada sebagian sarana pendidikan di pedalaman yang sudah layak digunakan meskipun dibangun tidak permanen, sekolah dari kayu dan papan, model panggung, dan terkesan kurang rapih bila dilihat dari aspek arsitektur.

Bentuk penolakan yang dilakukan masyarakat pedalaman terhadap sekolah, ada juga yang bersifat terselubung, dengan cara membawa anaknya ke ladang dalam waktu yang relatif lama, terutama saat musim tanam tiba, hingga musim tanam selesai. Akibatnya, pada saat anak masuk sekolah kembali, mereka sudah sangat tertinggal dalam mengikuti pembelajaran. Namun demikian, mereka tidak terima kalau tinggal kelas. Mereka semuanya harus naik kelas.

Penolakan yang lain, masyarakat pedalaman hingga kini masih banyak yang tetap tidak mau melanjutkan anaknya ke jenjang SMP meskipun sudah ada SMP satu atap dengan SD. Akibat berikutnya sudah dapat dipastikan, para orang tua juga tidak tertarik untuk melanjutkan anaknya ke jenjang SMA/SMK.

Bentuk kurangnya dukungan masyarakat terhadap pendidikan anak, dapat dilihat dari: a) banyaknya orang tua yang tidak pernah memperhatikan kewajiban belajar anak di rumah, bahkan anak dibiarkan berlama-lama menonton televisi, akibatnya tingkat penguasaan materi pelajaran rendah, b) orang tua tidak memperhatikan kelengkapan belajar anak seperti buku dan alat tulis, sehingga banyak alat tulis yang dibawa anak ke sekolah sudah tidak layak digunakan lagi, c) orang tua tidak memperhatikan kebersihan badan, kebersihan seragam, dan kondisi sepatu anak, sehingga banyak anak yang pergi ke sekolah tidak mandi pagi, tidak menggunakan seragam yang layak pakai, dan tidak menggunakan sepatu, d) orang tua juga kurang memperhatikan lingkungan bermain anak di luar rumah sehingga anak sudah mengenal rokok dan main di luar rumah sampai larut malam, e) orang tua juga kurang antusias untuk melanjutkan sekolah anaknya sampai ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan alasan tidak ada biaya atau tidak ada manfaat bagi diri anak, dan masih banyak masyarakat pedalaman yang menginginkan anaknya membantu mencari nafkah daripada harus melanjutkan sekolah, terbukti masih banyak masyarakat yang membiarkan anaknya putus sekolah (Kasinu, 2011:79).

Pada daerah yang benar-benar sulit dijangkau, para guru hanya sedikit yang mau dan “betah” ditugaskan di daerah tersebut. Sampai saat ini, masih ada beberapa daerah pedalaman yang sangat minim dengan sentuhan pendidikan. Panggung depan masyarakatnya, minim sekali bersinggungan dengan makna penting pendidikan. Hingga saat ini, masyarakat pedalaman golongan tua masih banyak yang tidak mengenal pendidikan. Hal yang paling

penting bagi mereka adalah kecukupan pangan dan papan, meski harus dicari dengan susah payah.

Penolakan masyarakat pedalaman terhadap pendidikan, meskipun terjadi sedikit ketegangan akan tetapi masih ada sintesis sehingga terjadi kebersamaan. Dengan kata lain, masih ada akomodatif dan kebersamaan antara guru, masyarakat, anak-anak itu sendiri, kepala desa, camat, dan pihak yang terkait dengan pendidikan anak. Terjadinya ketegangan karena masyarakat pedalaman sangat keberatan karena kebiasaan masyarakat membawa anak-anak mereka ke ladang, karena di rumah tidak ada yang merawat tidak diperbolehkan oleh sekolah. Akhirnya hanya anak-anak yang mempunyai kakak yang sudah dewasa atau mereka yang masih mempunyai nenek/kakek yang dapat ditinggal di rumah dan mengikuti sekolah.

Masyarakat baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan (ijin ke sekolah) melakukan kebiasaan lama itu, dan hal itu tentu bertentangan dengan semangat pendidikan yang selama ini masih selalu didengungkan untuk dilaksanakan dan diikuti oleh setiap anak yang masih sekolah, sehingga tidak terlalu tertinggal dalam mengikuti pelajaran dibandingkan anak-anak yang tidak dibawa ke ladang.

Dengan demikian, ada problematika yang sangat kuat yang dapat dijadikan sebagai argumentasi bahwa dengan adanya perubahan sosial dalam kaitannya dengan pembangunan mutu pendidikan yang ditandai dengan dibangunkannya sekolah yang dilengkapinya dengan sarana dan prasarana yang relatif lengkap, didatangkannya guru profesional, ternyata belum mampu sepenuhnya menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi anak.

Strategi halus yang diterapkan oleh para guru pada saat memasuki medan budaya lokal masyarakat pedalaman adalah dengan mengurangi sedikit demi sedikit unsur penolakan dan menambah sedikit demi sedikit unsur penyadaran akan arti pendidikan bagi anak di masa depan, yang pada akhirnya budaya lokal selalu membawa anak-anak ke ladang untuk membantu orang tua bagi anak yang sudah agak besar dapat dihilangkan atau dikurangi.

Hingga ahirnya proses penolakan tidak berlangsung terus-menerus, tetapi terjadi proses toleransi antara masyarakat dengan pemangku kepentingan pendidikan (guru, kepala sekolah, kepala desa, UPTD pendidikan, camat, dan pihak lainnya). Proses negosiasi misalnya dengan cara:

- 1) orang tua secara terang-terangan ke sekolah memamitkan anaknya yang akan dibawa ke ladang dengan perjanjian jumlah hari yang tidak bisa mengikuti pelajaran;
- 2) tetap meninggalkan anak di rumah terutama anak yang sudah kelas empat ke atas;
- 3) guru mengulang mata pelajaran yang tertinggal, dan guru member ulangan susulan bagi anak yang mengikuti orang tuanya ke ladang;
- 4) anak-anak ke ladang dengan membawa buku pelajaran untuk dipelajari seluruh materi pelajaran dan dikerjakan seluruh latihann soalnya, sehingga anak tidak lupa sama sekali dengan mata pelajaran yang telah dan akan dipelajari.

Melalui berbagai langkah tersebut, patut diyakini bahwa bentuk toleransi yang diupayakan oleh dua pihak diyakini dapat dijadikan jalan tengah untuk mengurangi ketegangan di antara mereka.

Keunikan masyarakat pedalaman dibandingkan masyarakat lain, yaitu adanya pemahaman bahwa, pendidikan anak tidak begitu penting, pendidikan dasar tidak dapat dijadikan bekal untuk mencari pekerjaan, pendidikan hanya menghabiskan biaya, pendidikan

hanya akan mengurangi sumbangan tenaga anak terhadap pekerjaan orang tua, dan pendidikan kurang memberikan keterampilan kepada anak dalam membantu orang tua di ladang.

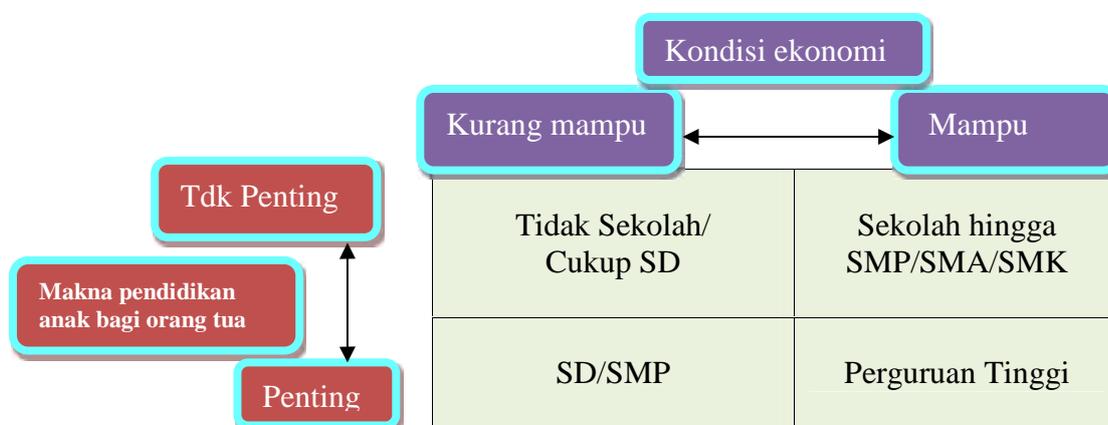
Membaca uraian di atas dapat dipahami bahwa membudayakan pendidikan pada masyarakat pedalaman tidak mudah dan tidak berjalan mulus, tetapi banyak hambatan, karena masyarakat pedalaman telah memiliki kebiasaan budaya lokal yang telah mengakar bertahun-tahun dan secara turun-temurun dilakukan, sehingga mereka akan melakukan penolakan baik secara terang-terangan maupun secara tersembunyi terhadap keberadaan pendidikan yang harus diikuti oleh anak-anak mereka. Penolakan mereka tidak bisa lepas dari sifat masyarakat pedalaman yang sulit menerima masukan dari orang lain. Hal ini memunculkan pemahaman bahwa pendidikan di pedalaman, tidak berjalan mulus, tetapi terjadi penolakan. Penolakan yang mereka lakukan pun tidak berlangsung selamanya tetapi terjadi proses toleransi dari kedua belah pihak dalam rangka penanaman pendidikan yang pada akhirnya terjadi adanya sintesis di antara keduanya.

#### DITERMINAN TINGKAT PENDIDIKAN ANAK MASYARAKAT PEDALAMAN

Pada dasarnya, setiap orang tua siswa, menghendaki sukses menyekolahkan anaknya hingga perguruan tinggi. Dengan lulus perguruan tinggi, anak memperoleh pekerjaan secara layak dan dapat membantu ekonomi orang tua. Namun, tidak semua orang tua sukses mencapai cita-cita itu.

Mayoritas, kondisi ekonomi anak-anak dari keluarga miskin hanya sekolah SD atau SMP. Anak dari keluarga mampu bersekolah hingga SMA/SMK dan perguruan tinggi. Mayoritas. Anak dari keluarga yang sangat mampu bersekolah hingga perguruan tinggi. Orang tua yang mampu dan sangat mampu mempunyai pemahaman yang baik akan arti pendidikan bagi anak. Artinya, dalam *mind* orang tua telah terkonstruksi pemahaman bahwa pendidikan mempunyai arti yang sangat penting bagi masa depan anak.

Dengan demikian, sosial-ekonomi orang tua dan kesadaran terhadap makna pendidikan mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pendidikan anak. Apabila ketiga hal tersebut digambarkan dalam bentuk diagram akan tampak sebagai berikut.

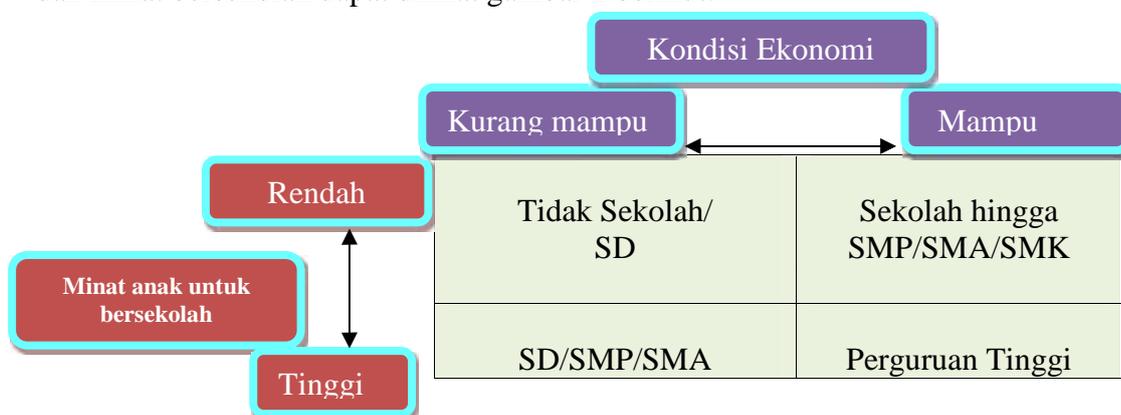


Gambar 1. Keterkaitan makna pendidikan anak, kondisi ekonomi, dan tingkat pendidikan anak. Sumber: Bunu (2012)

Berdasarkan gambar di atas, jika sosial-ekonomi orang tua kaya, diikuti kesadaran orang tua akan arti pendidikan bagi anak tinggi, maka mereka akan berusaha menyekolahkan anaknya sampai pendidikan tinggi. Jika, secara ekonomi berada, tetapi kesadaran orang tua terhadap pendidikan rendah, maka tingkat pendidikan anak pun rendah (maksimal SMA/SMK).

Sebaliknya, jika sosial-ekonomi orang tua miskin, tetapi kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak tinggi, maka orang tua akan berusaha sekuat tenaga agar anaknya bisa sekolah SMA/SMK. Kondisi terburuk, jika sosial ekonomi orang tua miskin, dan kesadaran terhadap pentingnya pendidikan anak rendah, maka tingkat pendidikan anak akan rendah. Sangat mungkin, anak tidak disekolahkan meskipun hanya tingkat SD.

Selain tingkat ekonomi orang tua, minat bersekolah juga menentukan *degree* pendidikan anak. Untuk menggambarkan keterkaitan antara kondisi sosial-ekonomi orang tua dan minat bersekolah dapat dilihat gambar 2 berikut.



Gambar 2. Keterkaitan Minat anak untuk bersekolah, kondisi ekonomi, dan tingkat pendidikan  
 Sumber: Bunu (2012)

Gambar di atas, menggambarkan secara jelas bahwa tingkat pendidikan anak tidak semata-mata dipengaruhi oleh sosial-ekonomi orang tua, tetapi juga dipengaruhi oleh tinggi rendahnya minat bersekolah.

Jika sosial-ekonomi orang tua tinggi atau kaya, diikuti minat bersekolah tinggi, maka *degree* pendidikan anak akan tinggi. Jika, secara ekonomi tinggi, tetapi minat bersekolah rendah, maka tingkat pendidikan anak akan rendah (maksimal SMA/SMK).

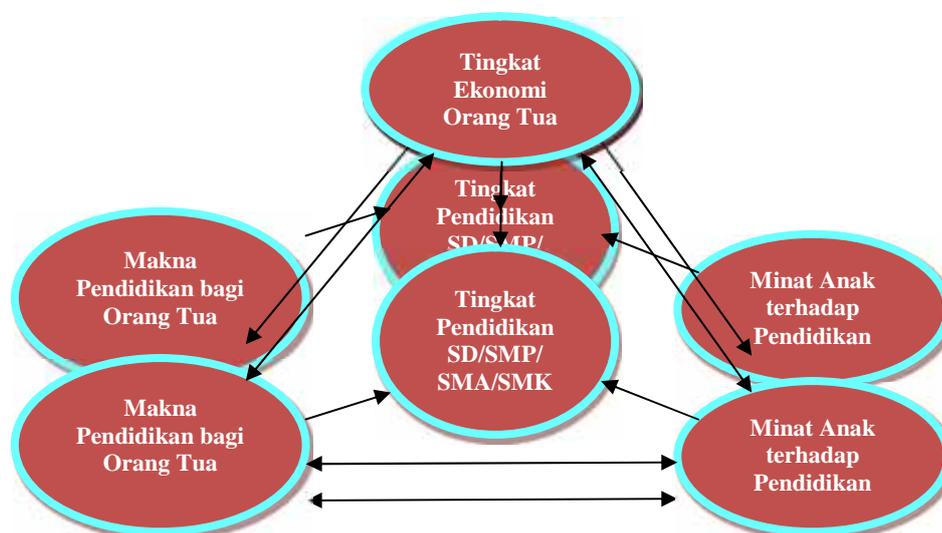
Sebaliknya, jika sosial-ekonomi orang tua miskin, tetapi minat bersekolah tinggi, maka *degree* pendidikan anak akan bergerak dari SD hingga SMA. Kondisi terburuk, jika sosial ekonomi orang tua miskin, dan minat bersekolah rendah, maka tingkat pendidikan anak akan rendah.

Berdasarkan diagram 1 dan 2 dapat dipahami, tingkat pendidikan anak masyarakat pedalaman dipengaruhi oleh: 1) kondisi sosial-ekonomi orang tua, 2) kesadaran orang tua terhadap arti penting pendidikan, dan 3) minat bersekolah anak.

Mayoritas, anak-anak yang DO, tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih

tinggi, tidak sekolah, kemungkinan disebabkan: 1) berasal dari keluarga yang tidak mampu, kesadaran orang tua terhadap makan pendidikan rendah, 3) minat bersekolah anak rendah.

Fenomena yang dapat menggambarkan keterkaitan antara kepemilikan sumber-sumber ekonomi, kesadaran terhadap makna pendidikan bagi anak-anaknya, minat bersekolah, dan tingkat pendidikan anak dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 3. Keterkaitan tingkat ekonomi, makna pendidikan  
Sumber: Bunu (2012)

Gambar di atas menjelaskan bahwa tinggi rendahnya tingkat pendidikan anak merupakan fungsi dari tinggi-rendahnya sosial-ekonomi orang tua, tingkat kesadaran orang tua terhadap makna pendidikan bagi anak, minat bersekolah. Semakin tinggi tingkat sosial-ekonomi orang tua, tingkat kesadaran orang tua terhadap makna pendidikan bagi anak, dan minat bersekolah menyebabkan anak cenderung melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Sebaliknya, semakin rendah tingkat sosial-ekonomi orang tua, tingkat kesadaran orang tua terhadap makna pendidikan bagi anak, dan minat berskolah menyebabkan anak cenderung tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

Seluruh uraian di atas menjadi hal yang menarik untuk terus diteliti oleh para peneliti berikutnya. Begitu juga banyaknya keunikan atau variasi yang dimiliki oleh masyarakat pedalaman sebagaimana telah dipaparkan perlu dikaji lebih mendalam. Penelitian mengenai masyarakat pedalaman di Kalimantan Tengah khususnya dan Indonesia pada umumnya telah banyak dilakukan, bukan saja oleh orang Indonesia, tetapi juga oleh para peneliti dari luar. Banyaknya kajian tentang masyarakat pedalaman di Indonesia, tetapi lebih banyak menyoroti tentang peranan pembangunan fisik infrastruktur dalam perubahan masyarakat.

Mehing (1983:59) dalam melakukan penelitian tentang SD kecil dan guru kunjung menyimpulkan bahwa semangat anak-anak untuk belajar sangat tinggi. Tingginya semangat untuk belajar dipengaruhi oleh dukungan orang tua dan semangat untuk maju. Begitu juga Rahmawanta (2013:45) menyatakan bahwa keadaan sosial ekonomi kurang mendukung untuk membiayai pendidikan anaknya yang menyebabkan anaknya yang lulus SD tidak melanjutkan ke SMP, orang tua lebih suka menyuruh anaknya bekerja membantu orang tuanya, serta pada umumnya orang tua masih memandang keliru terhadap arti penting pendidikan bagi kepentingan anak-anak.

Sutrisno (2013:24) menyatakan bahwa rendahnya prestasi yang dicapai siswa disebabkan karena kehidupan ekonomi yang serba terbatas, akhirnya siswa membantu orang

tua untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hidayati (2002:98) dalam melakukan penelitian tentang tingkat pendapatan, sikap orang tua tentang pendidikan dan tingkat pendidikan anak di Kelurahan Raja Basa Jaya menyimpulkan bahwa ada kecenderungan tingkat pendapatan dan sikap orang tua terhadap pendidikan akan sangat mempengaruhi tingkat pendidikan anak. Semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua, ada kecenderungan semakin tinggi pula tingkat pendidikan anak, apalagi didukung oleh tingginya sikap orang tua terhadap pendidikan.

Selanjutnya, Kalimah (2012:32) dalam melakukan penelitian tentang profil kehidupan sosial ekonomi masyarakat petani tebu dan pengaruhnya terhadap pendidikan anak di Desa Sukadana Udik, Kecamatan Bunga Mayang menyimpulkan bahwa pola kehidupan masyarakat yang masih rendah tingkat pendidikan dan tingkat ekonominya dapat dibuka mata hatinya untuk menyekolahkan anak, manakala persepsi orang tua terhadap pendidikan sudah baik.

Penelitian Cahyono (2004:75) tentang kajian historis kehidupan sosial ekonomi masyarakat bantaran daerah aliran sungai (DAS) Brantas Kelurahan Kesatrian Kota Malang dan Makna Pendidikannya menyimpulkan bahwa kehidupan sosial ekonomi masyarakat bantara sungai dalam memaknai pendidikan sangat positif. Masyarakat memandang pendidikan sebagai tangga untuk menaikkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Seluruh hasil penelitian di atas pada dasarnya menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan anak dapat dikaitkan dengan tingkat kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak. Menurut Sukidin (2003:24) kesadaran senantiasa berarti sadar akan sesuatu. Kesadaran hanya mungkin diperoleh dalam korelasinya dengan realitas; karena yang disebut "realitas" itu tidak lain berasal dari dunia kehidupan sehari-hari. Kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada dasarnya juga lahir karena adanya kesadaran masing-masing individu yang saling berinteraksi dengan kesadaran individu yang lain hingga menghasilkan kesadaran kolektif. Hal itulah yang menyebabkan masyarakat mau atau tidak mau menyekolahkan anaknya.

Kesadaran masyarakat pedalaman dalam bertindak untuk menyekolahkan atau tidak menyekolahkan anak berdasarkan makna-makna sekolah itu bagi mereka. Makna tersebut berasal dan interaksi sosial antara masyarakat yang satu dengan yang lain. Kemudian makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi sosial berlangsung. Sebagian masyarakat memaknai bahwa pendidikan memang penting bagi peningkatan kualitas generasi masyarakat pedalaman, hanya saja karena keterbatasan ekonomi, hanya sedikit masyarakat yang mampu menyekolahkan anak hingga pendidikan tinggi.

Uraian di atas menunjukkan bahwa pendidikan merupakan pilihan strategis bagi masyarakat. Dalam kaitan itu, untuk meningkatkan peran serta masyarakat menurut Sumarno (2013) dapat dilakukan dengan peningkatan pemahaman wawasan mengenai manajemen berbasis pengetahuan dan peningkatan kinerja dinas pendidikan kabupaten/kota yang dimulai dengan bantuan model asesmen diri kelembagaan yang objektif.

Dengan kata lain, masyarakat dalam memaknai pendidikan tersebut berasal dari interaksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang dianggap "cukup berarti" di dunia pendidikan. Hal ini sesuai dengan temuan Setiani dan Muchson (2010) yang menyatakan bahwa teman sebaya berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam penuntasan wajib belajar 9 tahun.

Masyarakat saling menafsirkan fenomena sosial termasuk fenomena pendidikan baik lingkup sempit maupun lingkup luas di luar wilayah kehidupannya. Mereka membatasi tindakan mereka yang tidak sesuai dengan kaidah, norma, dan hukum yang berlaku. Masyarakat tidak langsung memberi respon pada tindakan orang lain, tetapi didahului oleh pemaknaan terhadap tindakan orang lain tersebut. Masyarakat tidak langsung menerima atau tidak menerima anjuran pemerintah agar menyekolahkan anaknya minimal hingga SMP, tetapi masyarakat memaknai ajakan pemerintah itu, dengan mempertimbangkan rasionalitas untung dan ruginya menyekolahkan anak. Ketika pemaknaan mereka terhadap ajakan pemerintah lebih menguntungkan, maka mereka mengikuti ajakan tersebut, dan sebaliknya, ketika rasionalitas pemaknaan mengikuti ajakan pemerintah lebih merugikan, maka mereka akan mengabaikan ajakan pemerintah tersebut (Poloma, 2007:263).

Dengan demikian, kepastian makna yang akan menentukan tindakan masyarakat dalam membuat keputusan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Dalam kasus tindakan masyarakat dalam memilih untuk mengikuti atau tidak mengikuti kebijakan pemerintah yang selalu diserukan oleh kepala desa dan tokoh masyarakat dimaknai sebagai proses dialektika antara stimulus dan respon. Stimulus pemerintah tersebut berupa sekolah gratis, seragam sekolah gratis, sepatu gratis, dan buku gratis. Stimulus tersebut diikuti respon masyarakat berupa menyekolahkan dan tidak menyekolahkan anaknya.

Dalam perspektif interaksionisme simbolis yang diketengahkan Poloma (2007:264-265), tindakan masyarakat menolak program pemerintah dengan mengajak anaknya ke hutan, perlu "penafsiran tindakan." Tidak ubahnya, bila dalam pembicaraan seseorang pura-pura batuk ketika tidak setuju dengan pokok-pokok yang diajukan oleh si pembicara. Batuk tersebut menjadi suatu simbol yang berarti, yang dipakai untuk menyampaikan penolakan. Oleh karena itu, tindakan orang tua mengajak anaknya pergi ke hutan sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, yang menurut mereka, pendidikan tidak memberikan pengaruh apa pun terhadap kesejahteraan keluarga.

Hasil penelitian Widodo (2013) menyatakan bahwa faktor pendorong implementasi kebijakan wajar 9 tahun yaitu kesadaran wali murid dan siswa, serta partisipasi orang tua dalam implementasi kebijakan wajar; sedangkan faktor penghambatnya adalah kesadaran masyarakat yang masih kurang, faktor ekonomi masyarakat, faktor kemampuan belajar yang rendah, faktor teman sepermainan, dan juga faktor motivasi yang rendah.

Hasil penelitian Astusi (2007) menyatakan bahwa kemampuan orangtua dalam memberikan kontribusi dana ke sekolah memerlukan dukungan pemerintah dan masyarakat untuk lebih peduli memberikan bantuan-bantuan bagi peningkatan sarana-prasarana yang memadai bagi proses pembelajaran di sekolah. Begitu juga partisipasi edukatif perlu digalakkan oleh sekolah, masyarakat bahkan orangtua agar keterlibatan secara akademik bisa terbangun dalam proses pendidikan anak di rumah, di sekolah dan masyarakat. Partisipasi edukatif perlu didesain sesuai dengan kondisi dan potensi siswa, orangtua dan keluarga sebagai pedoman untuk mendorong keterlibatan anggota keluarga dalam proses pendidikan anak.

Dalam penelitiannya, Ana Herwana (2000) menyatakan bahwa keadaan sosial ekonomi kurang mendukung untuk membiayai pendidikan anaknya yang menyebabkan anaknya yang lulus SD dan tidak melanjutkan ke SMP. Orang tua lebih suka menyuruh

anaknyanya bekerja membantu orang tuanya, dan pada umumnya orang tua masih memandang keliru terhadap arti penting pendidikan bagi kepentingan anak-anak.

Penelitian Maria J. W dan Seidi Manopo 2002 yang berjudul, “Analisis mengenai Gejala Berprestasi Rendah dari Keluarga Prasejahtera (Ditinjau dari Aspek Status Sosial Ekonomi, Lingkungan Sosial Psikologis dan Lingkungan Pemukiman) di Kota Manado.” Kesimpulannya menyatakan bahwa rendahnya prestasi yang dicapai siswa disebabkan karena kehidupan ekonomi yang serba terbatas, akhirnya siswa tersebut membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Dalam penelitian Siti Hidayati 2002 dengan judul, “Tingkat Pendapatan, Sikap Orang Tua tentang Pendidikan dan Tingkat Pendidikan Anak di Kelurahan Raja Basa Jaya,” menghasilkan kesimpulan, adanya kecenderungan tingkat pendapatan, sikap orang tua terhadap pendidikan dan tingkat pendidikan anak. Semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua, ada kecenderungan semakin tinggi pula tingkat pendidikan anak. Apalagi didukung oleh tingginya sikap orang tua terhadap pendidikan.

Dalam penelitian Karyadinata (2004) dengan judul, “Profil Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Petani Tebu di Desa Sukadana Udik, Kecamatan Bunga Mayang.” Dalam kesimpulannya, penelitian itu menyimpulkan bahwa pola kehidupan masyarakat yang masih rendah tingkat pendidikan dan tingkat ekonominya dapat dibuka mata hatinya untuk menyekolahkan anak, manakala persepsi orang tua terhadap pendidikan sudah baik.

Dalam penelitian Susanti (2005) dengan judul, “Hubungan antara Keadaan Sosial Ekonomi Orang Tua tentang Tingkat Pendidikan dengan Anak Putus Sekolah,” dengan hasil ada hubungan keadaan sosial ekonomi orang tua tentang pendidikan dengan anak putus sekolah.

Seluruh teori yang dihasilkan melalui hasil penelitian terdahulu di atas, mulai dari konsep partisipasi pendidikan, wajib belajar, penolakan/resistensi dan konflik, serta negosiasi dalam konteks pendidikan, mempunyai relevansi yang sangat penting bagi pembahasan pada masyarakat pedalaman, karena seluruh hasil pembacaan teori itulah yang akan digunakan dalam melakukan pemahaman terhadap fenomena yang terjadi di lapangan, sekaligus dijadikan sebagai bahan rujukan saat melakukan pembahasan dan penarikan kesimpulan.

## **PENDIDIKAN YANG MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT PEDALAMAN**

Dalam perspektif pemberdayaan masyarakat pedalaman, sistem pendidikan menjadi bermakna bagi masyarakat pedalaman manakala mampu memberi dampak yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Pendidikan yang mensejahterakan masyarakat pedalaman adalah pendidikan yang mampu memberikan dampak jangka panjang dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedalaman. Proses pendidikan pada saat ini menjadi penentu signifikan dalam peningkatan keterampilan yang pada akhirnya dapat meningkatkan penghasilan masyarakat pedalaman di masa yang akan datang (Busro, 2015).

Selanjutnya dijelaskan bahwa manusia terdidik yang berketerampilan mempunyai peluang yang sangat besar dalam merebut pasar tenaga kerja. Semakin kompetitifnya pasar tenaga kerja yang ditandai dengan dibukanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun 2015 yang memungkinkan terjadinya persaingan tenaga kerja secara terbuka.

Dalam konsep pendidikan yang mensejahterakan masyarakat pedalaman, berbagai tantangan di atas menjadi pendorong untuk maju, berkembang, dan menang. Karena

pendidikan yang mensejahterakan masyarakat pedalaman bercirikan selalu mendahulukan rasional dibandingkan sentimental, yang ditandai dengan mengutamakan berfikir *positif thinking* daripada *negative tingking*, selalu berpedoman pada data dan hasil penelitian, obyektif dalam melakukan penilaian, lebih baik salah dari pada harus berbohong, dan mampu berfikir secara deduktif dan induktif (Busro, 20115).

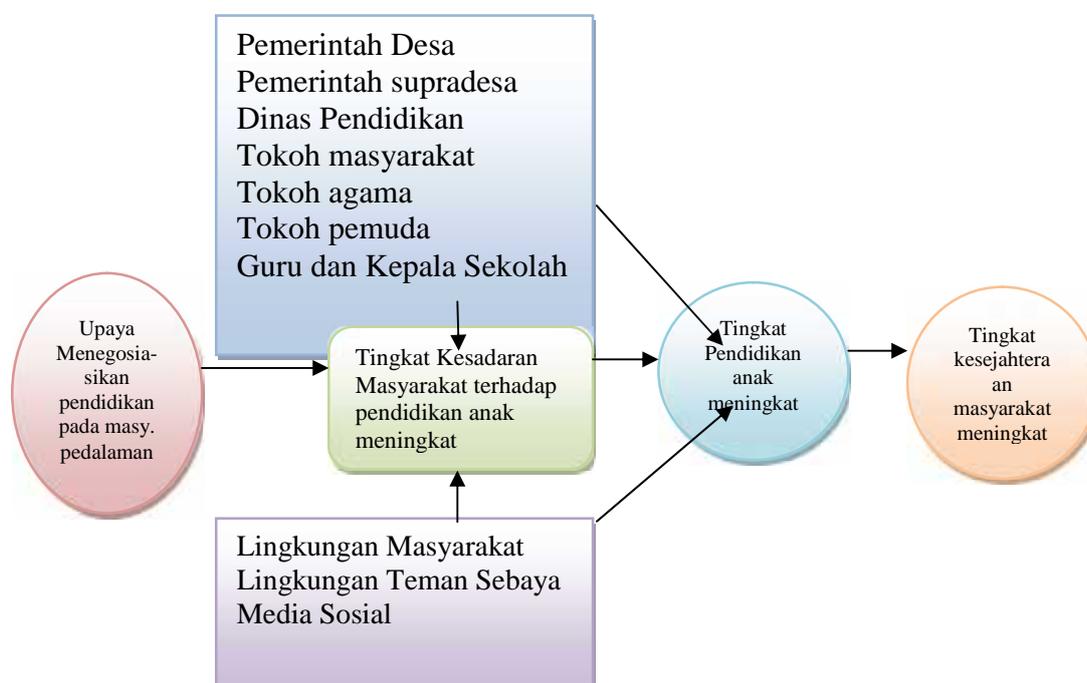
Secara panjang lebar dijelaskan bahwa sifat sentimental dalam proses pendidikan yang mensejahterakan masyarakat pedalaman tidak dapat diterapkan karena sifat ini bercirikan selalu berpamrih dalam melaksanakan seluruh pekerjaan, tidak bisa bekerja dengan obyektif, selalu subyektif dalam setiap melaksanakan penilaian, selalu ingin mendapatkan pujian, penghormatan diri lebih penting dibandingkan kapasitas diri, selalu ingin mendapatkan sesuatu yang lebih besar dibandingkan pengorbanan, selau mementingkan diri sendiri dan malas berbuat untuk orang lain, egois, dan berbagai sifat sentimental lainnya.

Pendidikan yang mensejahterakan masyarakat pedalaman tidak selalu dimaknai sebagai sebuah upaya mendapatkan kesejahteraan lahir/materi/fisik. Dalam konsep pendidikan yang mensejahterakan masyarakat pedalaman, kesejahteraan batin/immateri/psikis sesungguhnya lebih penting dibandingkan kesejahteraan lahir. Hal itu terjadi karena, kesejahteraan lahir tidak ada artinya sama sekali manakala tidak ada kesejahteraan batin.

Kesejahteraan batin pada masyarakat pedalaman sebagai sebuah kesejahteraan hakiki, karena keberadaannya melingkupi seluruh aspek jiwa yang mendorong untuk terus berkarya dengan cipta, rasa, karsa tanpa dibumbui oleh orientasi materi semata, tetapi berorientasi pada kesejahteraan masyarakat pedalaman.

Pendidikan yang mensejahterakan masyarakat pedalaman membekali siswa mempunyai kesiapan bersaing, kemampuan bahasa, kompetensi, daya juang, ketahananmalangan, dan kemampuan lainnya yang lebih baik. Oleh karena itu, ketika *out put* pendidikan di daerah pedalaman tidak mampu bersaing dengan SDM luar daerah, tentu SDM masyarakat pedalaman hanya akan menepati posisi bawah yang sifatnya tidak penting, bergaji rendah, tidak berkontribusi dalam pembuatan keputusan, dan tentunya beradapada posisi yang tidak terhormat. Dalam istilah bertamu, pendidikan masyarakat pedalaman yang tidak mampu mensejahterakan hanya akan menghasilkan tenaga kerja yang tidak kompeten, akan masuk dunia kerja dari dapur, dan hanya sedikit berpeluang untuk maju ke ruang utama atau ruang tamu. Posisi mereka selalu di belakang, pada tempat-tempat yang tidak strategis, hanya sebagai pembantu, hasil karyanya tidak dihargai sebagai hal yang penting (Muhammad Busro, 2015).

Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan model menegosiasikan pendidikan pada masyarakat pedalaman hingga mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat pedalaman adalah sebagai berikut.



Gambar 4.  
Model Menegosiasikan Pendidikan pada Masyarakat Pedalaman  
Sumber: Diadopsi dari Bunu (2014)

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa upaya menegosiasikan pendidikan pada masyarakat pedalaman dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan anak sangat dipengaruhi oleh peran masyarakat desa dan supra desa (dalam hal ini kecamatan), tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan guru/kepala sekolah yang bertugas di TK, SD, dan SMP yang bersinggungan langsung dengan orang tua dan anak.

Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap pendidikan anak juga dipengaruhi oleh lingkungan yang berkembang di masyarakat baik menyangkut mata pencaharian, lingkungan bermain anak, dan media sosial yang melingkupinya.

Ketika, tingkat kesadaran masyarakat terhadap pendidikan anak tinggi maka tingkat pendidikan anak pun akan tinggi, sebaliknya jika kesadaran masyarakat terhadap pendidikan anak rendah, tingkat pendidikan anak pun akan rendah.

Selanjutnya, ketika tingkat pendidikan tinggi, maka besar sekali peluang bagi anak untuk mendapatkan kesejahteraan di kemudian hari.

Semoga saja pendidikan pada masyarakat pedalaman mampu mengangkat harkat dan martabat anak-anak masyarakat pedalaman, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedalaman pada umumnya.

## SIMPULAN

Beberapa benang merah yang dapat diambil dari pidato singkat ini adalah:

1. Masalah pendidikan merupakan bagian dari berbagai masalah bangsa yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak karena pendidikan sangat menentukan martabat manusia dan

- bangsa. Proses pendidikan yang baik akan mampu memberi manfaat yang besar bagi masyarakat, termasuk dalam hal ini masyarakat pedalaman Kalimantan Tengah. Sayangnya, adanya faktor penghambat seperti: 1) geografi yang sulit dijangkau, terpencil, terisolir, 2) rendahnya pemahaman masyarakat akan makna penting pendidikan bagi anak, 3) rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pendidikan, 4) masih terbatasnya nuansa-nuansa pendidikan dalam ruang publik di daerah pedalaman, 5) rendahnya tingkat sosial ekonomi masyarakat pedalaman, 6) keterbatasan sumber daya manusia atau guru yang bersedia ditempatkan di daerah pedalaman, 7) lemahnya manajemen pemerataan guru, 8) lemahnya pengawasan terhadap disiplin guru di daerah pedalaman, 9) jauhnya lokasi sekolah menengah atas (SMA/SMK) dari lokasi tempat tinggal masyarakat
2. Negosiasi merupakan sebuah proses yang melibatkan dua pihak atau lebih yang berbeda pendapat berusaha mencapai kesepakatan. Dengan kata lain, negosiasi adalah proses pembuatan keputusan memberi dan menerima yang melibatkan pihak-pihak yang saling terkait dengan preferensi berbeda. Proses negosiasi misalnya dengan cara: a) orang tua secara terang-terangan ke sekolah memamitkan anaknya yang akan dibawa ke ladang dengan perjanjian jumlah hari yang tidak bisa mengikuti pelajaran; b) tetap meninggalkan anak di rumah terutama anak yang sudah kelas empat ke atas; c) guru mengulang mata pelajaran yang tertinggal, dan guru member ulangan susulan bagi anak yang mengikuti orang tuanya ke ladang; dan d) anak-anak ke ladang dengan membawa buku pelajaran untuk dipelajari seluruh materi pelajaran dan dikerjakan seluruh latihan soalnya, sehingga anak tidak lupa sama sekali dengan mata pelajaran yang telah dan akan dipelajari.
  3. Partisipasi adalah keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan program, memperoleh kemanfaatan, dan mengevaluasi pogram. Rasa ketidaktahuan masyarakat pedalaman berkaitan dengan arti penting pendidikan bagi anak karena: (a) kurang efektifnya pendekatan kemasyarakatan, keagamaan, dan sosial budaya dalam membangkitkan kesadaran masyarakat pedalaman terhadap pendidikan, (b) kurang penuhnya peran kepala sekolah, guru, dan pejabat pemerintahan desa dalam membangkitkan minat masyarakat pedalaman dalam menyekolahkan anak, dan (c ) masih rendahnya peran forum komite sekolah dan masyarakat pedalaman dalam meningkatkan kesadaran, sikap, persepsi dan penilaian masyarakat pedalaman akan arti pendidikan.
  4. Penyebab rendahnya tingkat pendidikan anak-anak pada masyarakat pedalaman disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya adalah: 1) tingkat sosial ekonomi masyarakat yang rendah, 2) persepsi masyarakat tentang pendidikan formal yang kurang baik sebagai akibat kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya pendidikan, 3) kurangnya motivasi orang tua dalam menyekolahkan anak, 4) rendahnya keinginan anak untuk melanjutkan sekolah, 5) rendahnya keberpihakan pemerintah hasil pemekaran terhadap pendidikan, sehingga belum mampu mendekati sekolah kepada masyarakat dengan cara membangun sekolah di daerah pemekaran, 6) kurangnya interaksi yang intensif antara masyarakat lokal dan pemerintah.
  5. Upaya untuk meningkatkan kesadara orang tua terhadap pendidikan dapat dilakukan dengan menghadirkan pendidikan di ruang publik yang ada pada masyarakat pedalaman secara umum yang bisa dilihat sebagai penyebaran nilai-nilai ilmu pengetahuan dengan memanfaatkan ruang publik, yaitu ruang atau arena, baik nyata maupun virtual, yang digunakan secara bersama oleh warga masyarakat untuk mengkomunikasikan dan

menegosiasikan berbagai ide dan kepentingan, termasuk di dalamnya berbagai hal yang bermuatan pendidikan.

6. Kehadiran jalan raya, saluran BTS (jaringan seluler), antenna parabola, HP pintar, guru-guru PNS, telah mampu memberikan perubahan cara pandang, cara pikir, dan cara berperilaku masyarakat, yang sebelumnya sangat "kampungan", menjadi terbuka wawasannya, baik berkaitan dengan wawasan pendidikan, ekonomi, politik, maupun wawasan lainnya. Dengan demikian, pendidikan pada masyarakat pedalaman dipengaruhi oleh kehadiran pendidikan di ruang publik seperti: 1) proses pembangunan berbagai infrastruktur pendidikan dan penunjang pendidikan, 2) semakin gencarnya dinas pendidikan dalam menempatkan guru di daerah pedalaman, 3) semakin maraknya ruang publik dalam menyuguhkan berbagai nuansa pendidikan, dan 4) adanya campur tangan lembaga supra desa (kecamatan, kabupaten) dan pihak legislatif dalam membangun sarana dan prasarana pendidikan.
7. Dalam perspektif pemberdayaan masyarakat pedalaman, sistem pendidikan menjadi bermakna bagi masyarakat pedalaman manakala mampu memberi dampak yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Pendidikan yang mensejahterakan masyarakat pedalaman adalah pendidikan yang mampu memberikan dampak jangka panjang dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedalaman. Proses pendidikan pada saat ini menjadi penentu signifikan dalam peningkatan keterampilan yang pada akhirnya dapat meningkatkan penghasilan masyarakat pedalaman di masa yang akan datang
8. Upaya menegosiasikan pendidikan pada masyarakat pedalaman dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan anak sangat dipengaruhi oleh peran masyarakat desa dan supra desa (dalam hal ini kecamatan), tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan guru/kepala sekolah yang bertugas di TK, SD, dan SMP yang bersinggungan langsung dengan orang tua dan anak. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap pendidikan anak juga dipengaruhi oleh lingkungan yang berkembang di masyarakat baik menyangkut mata pencaharian, lingkungan bermain anak, dan media sosial yang ketika, tingkat kesadaran masyarakat terhadap pendidikan anak tinggi maka tingkat pendidikan anak pun akan tinggi, sebaliknya jika kesadaran masyarakat terhadap pendidikan anak rendah, tingkat pendidikan anak pun akan rendah. Selanjutnya, ketika tingkat pendidikan tinggi, maka besar sekali peluang bagi anak untuk mendapatkan kesejahteraan di kemudia hari.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Akhmad Kasinu, 2014, "*Sintesis Keislaman Dan Budaya Lokal (Studi tentang Agama dan Budaya Lokal Masyarakat Pesisir Selatan Purworejo Jawa Tengah)*," Disertasi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
- Ana Herwana. 2000. *Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat dalam Mendukung Pendidikan Anaknya dalam Melanjutkan ke SMP*, Laporan Hasil Penelitian, Manado: UNM
- Astuti, Siti Irene. 2007. *Partisipasi Masyarakat dalam Desentralisasi Pendidikan: Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Partisipasi Orangtua dalam Peningkatan Mutu pada Satuan Pendidikan*. Lumbung Pustaka UNY, <http://eprints.uny.ac.id/370/> (diunduh 12 Desember 2013)

- Basrowi. 2010. *Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 Tahun*, Depok: Lembaga Studi Otonomi Daerah dan Politik Lokal.
- Bunu, Helmuth Y. 2002, “*Hubungan Bakat Diferensial dengan Prestasi Belajar Siswa IPA SMU Negeri di Palangka Raya*,” Tesis, Malang: Universitas Negeri Malang
- Bunu, Helmuth Y. 2012, “Masalah Anak Taman Kanak-Kanak menurut Guru dan Orang Tua serta Implementasiya dalam Bimbingan dan Konseling” *Jurnal Bimbingan Konseling*. Universitas Negeri Semarang, Vol 1 No 2 tahun 2012. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jubk>
- Bunu, Helmuth Y. 2011, “*Pendidikan dalam konstruksi masyarakat Suku dayak ot danum: Kajian Fenomenologi Pemetaan Persepsi dan Interaksi Masyarakat Tentang Pendidikan Formal di Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah*,” Disertasi, Malang: PPs Universitas Merdeka Malang
- Bunu, Helmuth Y. 2012, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah: Teori dan Prantik Konseling*, Palangka Raya: FKIP Unpar dan CV Jenggala Pustaka Utama Surabaya,
- Bunu, Helmuth Y. 2012. “Responsibilities of Government and Society to Children Education in *Desa Tumbang Marikoi* of Central Kalimantan,” *International Journal of Academic Research (IJAR)*, 4(6):31-38.
- Bunu, Helmuth Y. 2013. Peningkatan Motivasi dan Hasil Belajar PKn melalui Model Pengajaran Kolaborasi, *Jurnal Universitas Negeri Malang*, 22(2):34-46.
- Bunu, Helmuth Y. 2014. “Kesadaran Masyarakat Suku Dayak Terhadap Pendidikan Anak di Pedalaman Kalimantan Tengah”. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, UNY, Vol 3, Oktober 2014, TH. XXXIII.
- Busro, Muhammad. 2015. “*Pendidikan yang Mensejahterakan*,” Naskah Opini, diunduh dari <http://www.muhammadbusro.blog.pendididikan.yang.mensejahterakan.html>
- Cahyono, Reki. 2004. *Kajian Historis Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Bantaran Daerah Aliran Sungai Brantas*. Malang: Kesatrian.
- Cohen, Arthur A., and Uphoff, Norman T. 1979. *Feasibility and application of rural development participation: A state of the art paper*. Rural Development Committee Center for International Studies Cornell University.
- Davis, Keith. 1967. *Human behavior at work: organizational behavior*. (Fifth Ed.) New Delhi: TATA. McGraw-Hill Publishing Company LTD.
- Dusseldorp, Van D., B.W. M. 1981. *Participant in planned development influenced by governments of developing countries at local in rural areas*. The Nederland: Department of Rural Sociology in the Tropics and Sub Tropics Agricultural, University Wegenigen.
- Hadari Nawawi, “Negosiasi”, *Diktat Materi Kuliah S3 ESDM* (Jakarta: PPs UPI YAI Jakarta, 2012
- Hidayati, Siti. 2002. *Hubungan Antara Tingkat Pendapatan, Sikap Orang Tua Tentang Pendidikan dan Tingkat Pendidikan Anak*. Raja Basa Jaya. Bandar Lampung: Unila
- Ivancevich, John M., Roberth Konopaske, dan Michael T. Matteson, 2012, *Perilaku dan Manajemen Organisasi*, Diterjemahkan oleh Dharma Yuwono, Jakarta: Erlangga
- Kalimah, Siti, 2012, *Peran Stakeholders Pendidikan dalam Peningkatan Angka Partisipasi Pendidikan pada Masyarakat Perdesaan*, Thesis, UM Malang

- Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa Indonesia. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa Indonesia
- Karyadinata. 2004. “*Profil Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Petani Tebu di Desa Sukadana Udik, Kecamatan Bunga Mayang*,” Skripsi, Bandar Lampung: FKIP Unila
- Kasinu, Akhmad, 2014, “*Sintesis Keislaman dan Budaya Lokal: Studi tentang Agama dan Budaya Lokal Masyarakat Pesisir Selatan Purworejo Jawa Tengah*,” Disertasi, Yogyakarta: UIN Jalijaga Yogyakarta
- Kasinu, Akhmad. 2011. *Pendidikan dalam Konstruksi Masyarakat yang Berubah*, Surabaya: Janggala Pustaka Utama
- Lion, Eddy dan Helmuth Y. Bunu, 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Janggala Pustaka Utama
- Maria J. W dan Seidi Manopo. 2002. “*Analisis mengenai Gejala Berprestasi Rendah dari Keluarga Prasejahtera (Ditinjau dari Aspek Status Sosial Ekonomi, Lingkungan Sosial Psikologis dan Lingkungan Pemukiman) di Kota Manado*,” Laporan Hasil Penelitian, Manado: UNM
- Munir, 2007. *Pendekatan Kultur dalam Peningkatan Prestasi Belajar Siswa Sekolah Dasar Daerah Pedalaman*, Tesis, Bandar Lampung: PPs Unila
- Poloma, Margaret M. 2007. *Sociology Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahmawanta, Sulis, 2013, Bersama Masyarakat Membangun Pendidikan, *Jurnal Ilmu Pendidikan*,1(2):1-16.
- Sajogyo. 2005. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Setiani, Esy dan Ali Muhson. 2010. Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, Volume III, Nomor 1 <http://journal.student.uny.ac.id/jurnal/artikel/6027/47/655> (diunduh 12 Maret 2013)
- Setiyadi, Hanief. 2013. *Fenomenologi dalam Dunia Pendidikan*, Jakarta: Gaya Cendekia.
- Soenyono, 2010, “Pemberdayaan Masyarakat Rentan Kelompok Miskin Dalam Pembangunan Sadar Hukum” *Jurnal ADIL*, Universitas YARSI, Jakarta.
- Sudaryono. 2011, *Partisipasi Masyarakat dalam Program Wajar Dikdas 9 Tahun*, Depok: Lembaga Studi Ilmu Sosial dan Pendidikan
- Sukidin. 2003. *Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*, Surabaya: Surabaya Insan Cendekia
- Sumarno, Entoh Tohani, Hiryanto. 2013. “Asesmen Kebutuhan Penerapan Manajemen Berbasis Pengetahuan dalam Pembangunan Pendidikan Daerah.” *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, No 2, Juni 2013. [http://www. http://journal.uny.ac.id/index.php/cp/article/view/1480](http://www.http://journal.uny.ac.id/index.php/cp/article/view/1480) (diunduh 1 Juli 2013)
- Sumarno. 1996. *Hambatan dan strategi pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun*. Makalah. Dalam seminar Wajib Belajar 9 tahun oleh KKN IKIP Yogyakarta di Kecamatan Sayegan, Sleman, 1 Juni 1996.
- Sumarno. 1995. Peranserta masyarakat dalam upaya mewujudkan pendidikan untuk semua. *Cakrawala Pendidikan*. Edisi Khusus Dies, Mei (1995). IKIP Yogyakarta.
- Susanti. 2005. *Hubungan Antara Keadaan Sosial Ekonomi Orang Tua Tentang Tingkat Pendidikan Dengan Anak Putus Sekolah*. Tanjung Karang Barat: Pelita.
- Sutrisno. 2013. Memahami Anak Putus Sekolah dari Sisi Orang Tua Dan Anak, *Jurnal Mainstream*, Vol. 1 No. 2 Juli 2013.

UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Widodo, Aji Andri. 2013. Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun Di Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga, *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, Vol II, No 2 (2013).

Zamroni.1992. *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*, Yogyakarta: PT Tiara Wacara.